



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C NOMOR 39

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membenarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perkundungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095)
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526)
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230)
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
dan  
**BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI JAS A UMUM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samsir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samsir.
5. Bupati adalah Bupati Samsir.
6. Pegawai adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Samsir dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Samsir.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samsir selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samsir yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan balas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan penzinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Seloran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terja disertai menemukan tersangkanya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Samosir.
22. Rencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda, janda dampak psikologis.
23. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.



24. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
27. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
31. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
34. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penghantaran dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
35. Jalan Protokol/Utama adalah sistem jaringan jalan primer dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

36. Jalan Penghubung/sekunder adalah system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan dan juga merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan or. perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

## BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

### Pasal 12

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

### Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas
- Retribusi Pelayanan Kesehatan,
  - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
  - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguban Mayat,
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
  - Retribusi Pelayanan Pasar,
  - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
  - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
  - Retribusi Pengalangan Limbah Cair,
  - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan
  - Retribusi Pengendalian Meja Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

### Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, Jtongut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas (Pos Kesehatan Desa), Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan

kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk pelayanan pengadaan obat-obatan pada instalasi farmasi rumah sakit, kecuali pelayanan pendaftaran

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan termasuk pelayanan pengadaan obat-obatan pada instalasi farmasi rumah sakit
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan

#### Paragraf 2

##### Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan dan jenis obat yang digunakan dari instalasi farmasi rumah sakit

#### Paragraf 3

##### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan
- (2) Struktur dan besarnya tarif pengadaan obat-obatan pada instalasi farmasi Rumah sakit disesuaikan dengan Standar Harga Obat yang ditentukan Pemerintah dan/atau harga pengadaan pemerintah daerah,
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini

#### Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah

#### Bagian Kedua

##### Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

#### Paragraf 1

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan

#### Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi
- Pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
  - Pengangkutan sampah dan sumbernya dari/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah
  - Penyediaan lokasi pemungutan/pemusnahan akhir sampah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sekolah dan panti sosial

#### Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

#### Paragraf 2

##### Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan letak strategis, tempat, luas dan pemanfaatan bangunan

#### Paragraf 3

##### Struktur Dan Besarnya Tarif

#### Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
- Pemukiman
    - Pemukiman Rp 7.000,-/Bulan
    - Ruko Rp 10.000,-/Bulan
  - Perdagang Komerisial
    - Kios Rp 7.000,-/Bulan
    - Toko Swalayan, dan Grosir/Unit Rp 15.000,-/Bulan

3	Fasilitas Buah	Rp	15.000,-/Bulan
4	Pedagang sementara	Rp	1.000,-/Hari
<b>c. Hotel/Losmen</b>			
1	Hotel Berbintang	Rp	8.000,-/Bulan
2	Hotel Melati	Rp	50.000,-/Bulan
3	Losmen	Rp	30.000,-/Bulan
<b>c. Rumah Makan/Restoran/Warung</b>			
1	Rumah Makan/Restoran	Rp	20.000,-/Bulan
2	Warung/Kedai Nasi	Rp	10.000,-/Bulan
<b>e. Perusahaan/Pabrik/Industri</b>			
1	Luas 0 s/d 5.000 m <sup>2</sup>	Rp	10.000,-/Bulan
2	Luas 5.000 m <sup>2</sup> s/d 15.000 m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-/Bulan
3	Luas 15.000 m <sup>2</sup> s/d 25.000 m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-/Bulan
4	Luas 25.000 m <sup>2</sup> s/d keatas	Rp	80.000,-/Bulan
5	Penggilangan Padi	Rp	10.000,-/Bulan
<b>f. Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi</b>			
1	Bioskop /Tontonan Hiburan	Rp	50.000,-/Bulan
2	Billiard	Rp	10.000,-/Bulan
3	Salon Kecantikan	Rp	15.000,-/Bulan
4	Loket Angkutan Umum	Rp	20.000,-/Bulan
<b>g. Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain</b>			
1	Bengkel Mobil	Rp	200.000,-/Bulan
2	Bengkel Sepeda Motor	Rp	15.000,-/Bulan
3	Show Room	Rp	10.000,-/Bulan
4	Gudang	Rp	15.000,-/Bulan
<b>h. Perkantoran Pemerintah dan Non Pemerintah</b>			
Rp 20.000,-/Bulan			
<b>i. Rumah Sakit</b>			
1	Rumah Sakit Pemerintah	Rp	25.000,-/Bulan
2	Rumah Sakit Swasta	Rp	150.000,-/Bulan
3	Puskesmas	Rp	10.000,-/Bulan
4	Balai Pengobatan	Rp	10.000,-/Bulan
<b>j. Besarnya tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan khusus membuang secara langsung ke TPA selain dari Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar</b>			
			Rp 15.000,-/trip

#### Pasal 15

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di wilayah daerah

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak  
Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Pasal 17**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan

- a. Kartu keluarga,
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal,
- c. Kartu identitas kerja,
- d. Kartu penduduk sementara,
- e. Kartu identitas penduduk musiman,
- f. Kartu tanda penduduk,
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta percerahan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

**Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan, peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 20**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk ditetapkan sebagai berikut
- a. Kartu Tanda Penduduk ..... gratis
  - b. Kartu Keluarga (KK) untuk
    1. Warga Negara Indonesia ..... gratis
    2. Warga Negara Asing ..... Rp 20.000,-
  - c. Surat keterangan bertempal linggal ..... Gratis
  - d. Kartu identitas kerja ..... Gratis
  - e. Kartu tanda penduduk sementara ..... Gratis
  - f. Kartu identitas penduduk musiman ..... Gratis
- (3) Denda penggantian Kartu Keluarga dan KTP karena hilang, rusak, dan terlambat:
- a. Kartu Keluarga
    1. Warga Negara Indonesia ..... Rp 20.000,-
    2. Warga Negara Asing ..... Rp 100.000,-
  - b. Kartu Tanda Penduduk
    1. Warga Negara Indonesia ..... Rp 20.000,-
    2. Warga Negara Asing ..... Rp 120.000,-
  - c. Kartu identitas kerja ..... Rp 20.000,-
  - d. Kartu tanda penduduk sementara ..... Rp 20.000,-
  - e. Kartu identitas penduduk musiman ..... Rp 20.000,-
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak atas pelayanan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut
- a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ..... Gratis
  - b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perkawinan
    1. Warga Negara Indonesia
      - a) Di dalam kantor Catatan Sipil ..... Rp 40.000,-
      - b) Di luar kantor Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Panguruan ..... Rp 140.000,-
      - c) Di luar kantor Catatan Sipil di luar Wilayah Kecamatan Panguruan ..... Rp 340.000,-
    2. Akte Perkawinan WNA
      - a) Di dalam kantor Catatan Sipil ..... Rp 150.000,-
      - b) Di luar kantor Catatan Sipil di Wilayah Kecamatan Panguruan ..... Rp 250.000,-
      - c) Di luar kantor Catatan Sipil di luar Wilayah Kecamatan Panguruan ..... Rp 450.000,-
  - c. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perceraian

1. Akte Perceraian untuk Warga Negara Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Rp 500.000,-
  2. Akte Pemerahan untuk Warga Negara Asing berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Rp 10.000.000,-
- d. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengangkatan Anak
1. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia berdasarkan putusan dan/atau pengukuhan pengadilan Rp 100.000,-
  2. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan putusan dan/atau pengukuhan pengadilan Rp 210.000,-
- e. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perubahan Nama berdasarkan putusan dan/atau pengukuhan pengadilan Rp 100.000,-
- f. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kemalangan
1. Untuk Warga Negara Indonesia Gratis.
  2. Untuk Warga Negara Asing Rp 100.000,-

#### Pasal 21

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang dipungut di wilayah daerah

#### Paragraf 4

Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan

#### Pasal 22

Keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan dalam catatan sipil dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:

- a. Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi anak pertama dan kedua dikenakan denda sebesar ..... Rp 15.000,-
- b. Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi anak ketiga dan seterusnya dikenakan denda sebesar ..... Rp 20.000,-
- c. Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Asing di atas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi anak pertama dan kedua dikenakan denda sebesar ..... Rp 100.000,-
- d. Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Asing di atas 60 (enam puluh) hari bagi anak ketiga dan seterusnya dikenakan denda sebesar ..... Rp 120.000,-



- e. Warga Negara Indonesia yang pelaporan perkawinannya lebih dari 60 (enam puluh) hari ..... Rp.140.000
- f. Untuk perkawinan Warga Negara Asing yang dicatatkan lebih dari 60 (enam puluh) hari ..... Rp.450.000
- g. Untuk perceraian Warga Negara Indonesia yang dicatatkan dengan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ..... Rp.750.000
- h. Untuk perceraian warga negara asing yang dicatatkan dengan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ..... Rp.1.250.000
- i. Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia dengan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris ..... Rp.150.000
- j. Untuk pengangkatan anak WNA dengan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris ..... Rp.250.000
- k. Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya Akte Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar ..... Rp.20.000
- l. Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya Akte Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing dikenakan denda sebesar ..... Rp.160.000

**Bagian Keempat**

**Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah

**Pasal 24**

Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurusan pembakaran/pengabuan mayat dan

b. Pemakaian tanah tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah mayat/jenazah yang dimakamkan atau diperabukan

#### Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan tempat, penguburan, pembakaran/pengabuan, operasional dan pemeliharaan

#### Paragraf 3

##### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 28

Besarnya tarif retribusi dibayarkan saat huni pemakaman dilepaskan sebagai berikut:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Biaya untuk makam dewasa                  | Rp 700.000,-/makam   |
| b. Biaya untuk makam anak-anak               | Rp 500.000,-/makam   |
| c. Biaya perawatan makam dewasa              | Rp 150.000,-/3 tahun |
| d. Biaya perawatan makam anak-anak           | Rp 900.000,-/3 tahun |
| e. Biaya penggalan tulang Betulang Dewasa    | Rp 200.000,-/makam   |
| f. Biaya penggalan tulang Betulang Anak-Anak | Rp 150.000,-/makam   |
- (2) Tarif pelayanan pengabuan mayat Rp 250.000,-/mayat.

#### Bagian Kelima

##### Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Paragraf 1

##### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum

#### Pasal 30

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum

yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk penunggal atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan tenggat waktu penggunaan.

#### Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

##### a. Parkir Harian

###### 1. Mobil Barang

- a) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) lebih Rp 3.000,-/parkir
- b) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) " " Rp 2.000,-/parkir
- c) Pick up/Roda 4 (empat) " " " " Rp 1.500,-/parkir

###### 2. Mobil Bus " " " " Rp 2.000,-/parkir

###### 3. Mobil minibus " " " " Rp 1.500,-/parkir

###### 4. Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua " " " " Rp 1.000,-/parkir

###### 5. Becak bermotor/Kendaraan Roda Tiga " " " " Rp 1.000,-/parkir

##### b. Parkir Telap/Berlanggahan

###### 1. Mobil Barang

- a) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) lebih Rp 72.000,-/bulan
- b) Mobil Truk dengan roda 6 (enam) " " " " Rp 48.000,-/bulan
- c) Pick up/Roda 4 (empat) " " " " Rp 36.000,-/bulan

###### 2. Mobil Bus " " " " Rp 48.000,-/bulan

###### 3. Mobil Minibus " " " " Rp 36.000,-/bulan

###### 4. Becak bermotor/Kendaraan Roda Tiga " " " " Rp 24.000,-/bulan

**Pasal 14**

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 15**

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/seretehana.

**Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/seretehana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

**Pasal 17**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dagangan, luas dan jenis bangunan.

**Paragraf 3**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 19**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Loads
    1. Dagangan Sandang Rp 2.000./hari pekan/M<sup>2</sup>
    2. Dagangan Pangan Rp 15.000./hari pekan/M<sup>2</sup>

3. Dapangan Daging dan Ikan basah ..... Rp3000./hari pekan/M<sup>2</sup>
- b. Kios ..... Rp2000./hari pekan/M<sup>2</sup>
- c. Pedagang Kakilima (PKL) dalam Pekan ..... Rp.1000./hari pekan/M<sup>2</sup>
- d. Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar sebagai berikut
1. Mandi ..... Rp. 3000.-
  2. Buang air besar ..... Rp. 1500.-
  3. Buang air kecil ..... Rp. 1000.-

**Pasal 40**

Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas pasar dibenarkan

**Bagian Ketujuh**

**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 41**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang dibenarkan

**Pasal 42**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat

**Pasal 43**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang bersangkutan
- (2) Wajb Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau penyetor retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

**Paragraf 2**

**Cara Menentukan Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 44**

Tingkat penggunaan jasa dikira berdasarkan jenis alat yang diperiksa, frekuensi pemeriksaan dan alat atau bahan yang digunakan

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 45

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

- a. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut
1. Alat pemadam Kebakaran yang berisi busa, Super busa dan sejenisnya
    - a) Sampai dengan 25 liter sebesar Rp 3.000,-
    - b) Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp 3.500,-
    - c) Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp 4.000,-
    - d) Lebih dari 150 liter sebesar Rp 5.000,-
  2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas atau sejenisnya
    - a) Sampai dengan 6 kg sebesar Rp 4.000,-
    - b) Lebih dari 6 kg s/d 10 kg sebesar Rp 5.000,-
    - c) Lebih dari 10 kg s/d 150 kg sebesar Rp 6.000,-
    - d) Lebih dari 150 kg sebesar Rp 7.000,-
- b. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran, alarm otomatis dan sprinkler per tahun adalah sebagai berikut
1. Hidran
    - a) Hidran halaman Rp 25.000,- per unit
    - b) Hidran gedung (dalam ruangan) Rp 30.000,- per unit
  2. Alarm otomatis sebesar Rp 25.000,- per unit
  3. Sprinkler sebesar Rp 25.000,- per unit
- c. Retribusi pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya per tahunnya sebagai berikut
1. Bahan-bahan yang mudah meledak Rp 50,-/kg
  2. Bahan-bahan beracun/ insektisida Rp 40,-/kg
  3. Bahan-bahan dalam perusak (Corrosive) Rp 30,-/kg
  4. Bahan-bahan dalam kondisi normal yang di mudah menyala Rp 11000,-/ton
  5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp 3.000,-/ton
  6. Bahan-bahan yang berbahaya lainnya yang tidak termasuk dalam angka 1, 2, 3, 4 dan 5 Rp 2000,-/ton
- d. Retribusi pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan per unit
1. Sampai dengan 10.000 m<sup>2</sup> Rp 15,-/M<sup>2</sup>
  2. Lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> s/d 40.000 m<sup>2</sup> Rp 10,-/M<sup>2</sup>

## Pasal 46

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pe layanan fasilitas pemeriksaan diberikan

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

## Paragraf 1

## Nama, Objek dan Subjek Retribusi:

## Pasal 47

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta

## Pasal 48

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang bersangkutan
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta

## Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah hari penggunaan serta hasil cetakan

## Paragraf 3

## Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 51

Struktur besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta per lembar ditetapkan sebagai berikut

a. Peta Foto		
1	Digital/Soft Copy/Cd	Rp 300.000,-
2	Cetak Ukuran A1	Rp 150.000,-
3	Cetak Ukuran A2	Rp 100.000,-
4	Cetak Ukuran A3	Rp 75.000,-
b. Peta Dasar		
1	Digital/Soft Copy/Cd	Rp 250.000,-
2	Cetak Ukuran A1	Rp 150.000,-

3. Cetak Ukuran A2	Rp 100.000,-
4. Cetak Ukuran A3	Rp 75.000,-
<b>c. Peta Tematik</b>	
1. Digital/Soft Copy/Cd	Rp 200.000,-
2. Cetak Ukuran A1	Rp 150.000,-
3. Cetak Ukuran A2	Rp 100.000,-
4. Cetak Ukuran A3	Rp 75.000,-
<b>d. Peta Teknis</b>	
1. Digital/Soft Copy/Cd	Rp 200.000,-
2. Cetak Ukuran A1	Rp 150.000,-
3. Cetak Ukuran A2	Rp 100.000,-
4. Cetak Ukuran A3	Rp 75.000,-

**Pasal 52**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggantian biaya cetak peta diberikan

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 53**

Dengan nama retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus

**Pasal 54**

- (1) Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

**Pasal 55**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus
- (2) Wajib retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk penunggal atau pemotong retribusi pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**



**Pasal 56**

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volumeinja yang disedot dan lelat lokasi wilayah pelayanan penyedotan kakus.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 57**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan ukuran kakus/septic tank dan kondisi/letak wilayah pelayanan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemukiman/Rumah Tangga Rp 150 000,-/septic tank
  - b. Kantor Rp 200 000,-/septic tank
  - c. Rumah Makan/Restoran Rp 250 000,-/septic tank
  - d. Hotel/Penginapan Rp 350 000,-/septic tank
- (3) Setiap lokasi di wilayah pelayanan penyedotan kakus, dikenakan tambahan biaya operasional yang besarnya sebagai berikut:
  - a. Dalam wilayah kecamatan Pengukuran, sebesar Rp 70 000,-
  - b. Dalam wilayah kecamatan Simanindo, sebesar Rp 150 000,-
  - c. Dalam Wilayah, kecamatan Ronggur Nihuta, sebesar Rp 100 000,-
  - d. Dalam wilayah kecamatan Sianjur Mula-mula, sebesar Rp 150 000,-
  - e. Dalam wilayah kecamatan Hana, sebesar Rp 150 000,-
  - f. Dalam wilayah kecamatan Palipi, sebesar Rp 125 000,-
  - g. Dalam wilayah kecamatan Nanggotan, sebesar Rp 150 000,-
  - h. Dalam wilayah kecamatan Onan Runggu, sebesar Rp 175 000,-
  - i. Dalam wilayah kecamatan Siboh, sebesar Rp 200 000,-

**Pasal 58**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang terulang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas disediakan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 59**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 60**

- (1) Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.

perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, Perusahaan Daerah dan pihak Swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi baku mutu ke drainase, sungai dan tanah.

#### Pasal 61

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas pengolahan limbah cair.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang mengeluarkan limbah cair dan volume limbah cair.

#### Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan dampak lingkungan, cakupan resiko, volume dan jenis limbah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengolahan limbah cair melalui IPAL di tempat pemukiman:
    1. Rumah Tangga Rp. 1.000,-/bulan,
    2. Perumahan /Perkantoran Rp. 2.000,-/bulan,
    3. Rumah makan dan Restoran Rp. 3.000,-/bulan,
    4. Industri Kecil Rp. 10.000,-/bulan,
    5. Industri Menengah Rp. 25.000,-/bulan,
    6. Industri Besar Rp. 50.000,-/bulan,
    7. Kegiatan Perhotelan
      - a) Hotel Melati Rp. 15.000,-/bulan,
      - b) Hotel Bintang 1 Rp. 25.000,-/bulan,
      - c) Hotel Bintang 2, 3 dan 5 Rp. 50.000,-/bulan.
  - b. Pengolahan Limbah Cair melalui pengangkulan ke Instalasi Limbah Cair Milik Pemerintah Kabupaten Samosir
    1. volume limbah 0 s/d 200 m<sup>3</sup>/bulan Rp. 15,-/m<sup>3</sup>,
    2. volume limbah 201 m<sup>3</sup> s/d 500 m<sup>3</sup>/bulan Rp. 20,-/m<sup>3</sup>,
    3. volume limbah 501 m<sup>3</sup> s/d 750 m<sup>3</sup>/bulan Rp. 25,-/m<sup>3</sup>,
    4. volume limbah diatas 750 m<sup>3</sup>/bulan Rp. 30,-/m<sup>3</sup>

**Pasal 64**  
Retribusi Pengolahan Limbah cair yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas diberikan

**Paragraf 4**  
**Pemeriksaan**

**Pasal 65**

- (1) Setiap limbah cair yang akan diolah harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas yang berwenang
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**Bagian Kesebelas**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 66**  
Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang

**Pasal 67**  
Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 adalah

- a Pelayanan pengujian alat ukur, timbangan, timbangan dan perlengkapannya, dan
- b Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pasal 68**
- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.
  - (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotong atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 69**  
Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan lingkup kesulitan, karakteristik jenis kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 70**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tera
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut
- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| a. Timbangan Emas sebesar            | Rp 30.000,-/buah  |
| b. Timbangan Dagang                  |                   |
| 1. 1 s/d 10 kg sebesar               | Rp 5.000,-/buah   |
| 2. 10 s/d 25 kg sebesar              | Rp 10.000,-/buah  |
| 3. 25 s/d 50 kg sebesar              | Rp 15.000,-/buah  |
| 4. 50 s/d 100 kg sebesar             | Rp 20.000,-/buah  |
| 5. 100 s/d 250 kg sebesar            | Rp 25.000,-/buah  |
| 6. > 250 kg sebesar                  | Rp 30.000,-/buah  |
| c. Takaran/Liter sebesar             | Rp 5.000,-/buah   |
| d. Alat ukur Bahan Bakar Minyak SPBU | Rp 200.000,-/buah |

**Paragraf 4**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 71**

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

**Pasal 72**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pelayanan diberikan.

**Bagian Kedua belas**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 73**

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

**Pasal 74**

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 75**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi

**Paragraf 2**  
**Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 76**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan frekuensi pelayanan kewenangan, pengendalian, pencegahan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, kegiatan telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan atau berdirinya menara yang mengancam biaya pelaksanaan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 77**

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % dan nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi yang diawasi

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 78**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan administrasi

**Pasal 79**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB IV  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 80**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belumlah terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (5) dan (6) diatur dengan Peraturan Bupati
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kedua  
Sanksi Administratif**

**Pasal 81**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 82**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan atau lain yang sejenis
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Tindakan sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Pemanggilan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Pemanggilan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan

##### Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kelima Keberatan

##### Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### Pasal 85

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 86

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 87

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama enam (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipotongnya untuk melunasi utang retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati menambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

#### Pasal 88

- (1) Bupati dapat melakukan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi.



- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

### Pasal 90

- (1) Utang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB VII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 91

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib

- g. memperlihatkan dan/atau menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - h. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
  - i. memberikan keterangan yang diperlukan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati

#### BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 92

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### BAB X PENYIDIKAN

##### Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lainnya melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau menalarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan, dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XI KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

##### Pasal 95

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 merupakan penerimaan negara.

#### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), siapa yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat dilagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

#### Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Peserta perubahannya,
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar,
- d. BABV, BAB VI dan BAB VII Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengawasan dan Pemertkkaan Kualitas Air,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pembinaan hygiene dan sanitasi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta,
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepidalan Umum,
- j. BAB IX Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Samosir

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

#### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

##### Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 27 Desember 2011

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal, 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

cap/dto

II. HATORANGAN SARMAYA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
 NOMOR : 17 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Poliklinik Umum	3.000	8.000	6.000	17.000
2	Poliklinik Spesialis	3.000	8.000	11.000	22.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP  
 1. SUPERVIP, VIP DAN KELAS

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Super Vip				
	- Dokter Umum / dokter gigi	25.000	285.000	100.000	410.000
	- Spesialis	25.000	285.000	150.000	450.000



3 KONSULTASI MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	Dokter Spesialis	Antar Spesialis
1	KONSULTASI di ruang perawatan	50,000	50,000
2	KONSULTASI di ICU	90,000	90,000

C. IGD (Instalasi Gawat darurat)

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	
1	2	3	4	5	6	
1	Heacting:					
	a. Luka Jahitan 1-3	15,000	20,000	15,000		50,000
	b. Pertambahan setiap jahitan luka > 3 jahitan	2,000	-	2,000		4,000
	c. Buka heacting/heacting					
	- Buka Heacting	6,000	5,000	5,000		16,000
	d. Pembersihan luka /non Heacting					
	- Kecil	6,000	20,000	6,000		32,000
	- Sedang	12,000	20,000	12,000		44,000
	- Besar	18,000	20,000	18,000		56,000
2	Kumbah lambung	60,000	30,000	35,000		125,000
3	Cooling spoiling	50,000	20,000	25,000		105,000
4	Tindakan emergency					



	a. Syok ( R.J.F )	5,000	45,000	35,000	85,000
	b. Luka Bakar Ringan	15,000	20,000	20,000	55,000
	c. Luka Bakar Sedang	30,000	20,000	35,000	85,000
	d. Luka Bakar Berat	50,000	20,000	55,000	125,000
5	Pelayanan Umum	3,000	10,000	6,000	19,000
6	Extirpasi benda asing				
	a. Kecil				
	- Cerumen prof ( 1 telinga )	10,000	20,000	25,000	55,000
	- Padi, kapas, jagung				
	b. Sedang				
	- Kacang, manik-manik, mainan	15,000	20,000	30,000	65,000
	- Ekstraksi kuku				
	c. Besar				
	- Mimis ( peluru senapan angin)	20,000	20,000	35,000	75,000
	- Extirpasi kulis clavus				
	- Insisi abses				
7	Observasi di IGD				
	a. 0 s/d 4 jam	5,000	20,000	15,000	40,000
	b. 4 jam s/d 8 jam	10,000	30,000	25,000	65,000
8	Pemasangan NGT	30,000	20,000	20,000	70,000
9	Pemasangan Spalik				
	- 1 s/d 2 extremitas	30,000	20,000	20,000	70,000
	- diatas 2 extremitas	50,000	20,000	30,000	100,000
10	Nebulaizer / Kali	5,000	20,000	10,000	35,000
11	Sirkumsisi	40,000	50,000	50,000	150,000

D. PELAYANAN PONEK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Persalinan Normal	100.000	50.000	300.000	450.000
2	Persalinan Giemelli/Kembar,dst	150.000	50.000	350.000	550.000
3	Persalinan dengan tindakan vakum	120.000	80.000	350.000	550.000
4	Persalinan Letak Bokong( Abnormal)	150.000	50.000	350.000	550.000
5	Curetase	100.000	50.000	250.000	400.000
6	Manual Plasenta	100.000	50.000	200.000	350.000
7	Embriotomi	150.000	70.000	400.000	620.000

E. ICU (Intensive Care Unit)

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Perawatan khusus di ICU				
	Dokter Spesialis	-	110.000	175.000	285.000
	Dokter Umum / Dokter jaga ICU	-	110.000	125.000	235.000
2	Tindakan Pelayanan				
	Kanulasi Vena Perifer / Infus	20.000		5.000	25.000
	Kanulasi Vena Sentral (CVC) Dewasa	150.000	50.000	100.000	300.000
	Kanulasi Vena Sentral (CVC) Anak	150.000	50.000	100.000	300.000
	WSD (Water Sealed Drainage)	300.000	50.000	250.000	600.000

Vena Sectie	50,000	20,000	50,000	120,000
DC Shock	15,000	50,000	45,000	110,000
Tracheostomy	250,000	50,000	150,000	450,000
Intubasi Trakhea	75,000	50,000	75,000	200,000
Ekstubasi Trakhea	30,000	25,000	45,000	100,000
RJP	20,000	60,000	70,000	150,000
Setting Ventilator	20,000	60,000	50,000	130,000
Suction / Washing / Hari	10,000	15,000	10,000	35,000
Nebulizer / Kali	5,000	20,000	10,000	35,000
Inseri NGT	50,000	15,000	15,000	80,000
Maag-Cooling / Cooling Spoeling	50,000	20,000	30,000	100,000
Pasang Catheter Urine	50,000	10,000	20,000	80,000
Lepas Kateleer Urine	10,000	5,000	5,000	20,000
Klisma	20,000	15,000	10,000	45,000
EKG	20,000	30,000	15,000	65,000
Ventilator (Jasa sarana/hari)	20,000	200,000	50,000	270,000
Siringe Pump (Jasa sarana/hari)	20,000	30,000	15,000	65,000
Infusion Pump (Jasa sarana/hari)	20,000	30,000	15,000	65,000
Bed Decubitus	-	40,000	-	40,000
Warm Mattres / Hari	-	40,000	-	40,000
Oksigen / Liter (sistem central)	80	10	-	90
Oksigen / Liter	80	10	-	90

F. TINDAKAN OPERATIF BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA KUMAIL SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Operasi kecil	350,000	300,000	500,000	1,250,000
2	Operasi Sedang	650,000	300,000	900,000	1,850,000
3	Operasi Besar	1,000,000	300,000	1,300,000	2,600,000

Ketentuan :

kelompok penyakit berdasarkan kategori

- Operasi kecil yang dikerjakan dikamar operasi :

No	Nama Penyakit
1	Tumor jinak (Aleroma, Lipoma dan lain-lain)
2	Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana
3	Debridemen

- Operasi sedang

No	Nama Penyakit
1	Hernia, hidrokel, varikokel
2	Apendiksitis, infiltrat
3	Batu buli-buli
4	Penyakit pembuluh darah perifer
5	Bibir sumbing
6	Kelainan tangan bawaan
7	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi
8	Dislokasi sendi, bahu siku, pergelangan tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang.

3 Operasi Dasar

No	Nama Penyakit
1	Kelenjar bawahan ditulang muka, jaringan lunak, neurofibroma, dll
2	Kriptorkismus, Mekakolon, Hispospadi CTEV dan kelainan orthopedi lain,
3	Pembuluh darah intra abdominal, retroperitoneum, mediastinum
4	Semua jenis tumor ganas
5	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam tindakan sedang

G. TINDAKAN OPERATIF OBSTETRI dan GINEKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Operasi kecil	350,000	300,000	600,000	1,250,000
2	Operasi Sedang	650,000	300,000	900,000	1,850,000
3	Operasi Besar	1,000,000	300,000	1,300,000	2,600,000
4	Operasi Khusus / Estetika	1,100,000	400,000	1,700,000	3,200,000

Ketentuan :

Kelompok penyakit berdasarkan kategori :

1. Operasi kecil :

No	Nama Penyakit
1	Kista bartolini
2	Ektirpasi polip
3	Tubectomi
4	Ektirpasi mioma geburt



2. Operasi sedang

No	Nama Penyakit
1	Kolporapi
2	Minilaparotomi (kontak)
3	Laparotomi KET

3. Operasi Besar

No	Nama Penyakit
1	Kista Ovarium
2	Sectio caesaria
3	Repar Ruptur Perineum Grade III, IV
4	Miomektomi

4. Operasi Khusus

No	Nama Penyakit
1	Histerektomi abdominal atau vaginal
2	Laparotomi keganasan Ginekologi
3	Vaginoplasti
4	Reparasi vistel dan Tuba

H. PELAYANAN D: POLIKLINIK SPESIALIS

1. POLI BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana / Ganti Verban	25.000	10.000	10.000	45.000
2	Pemasangan Bical	40.000	10.000	15.000	65.000

3	Pemasangan Gyps	40,000	10,000	20,000	70,000
4	Pemasangan neck Kollar	10,000	10,000	10,000	30,000
5	Pemasangan ransel verbal	12,000	10,000	10,000	32,000
6	Pemasangan ETT Intubasi	12,000	20,000	20,000	52,000
7	Pemberian nebulizer	5,000	10,000	10,000	25,000
8	Dedriement Kecil	10,000	10,000	10,000	30,000
9	Dedriement Sedang	20,000	10,000	15,000	45,000
10	Primer heacing	10,000	10,000	15,000	35,000
11	Cross Insisi	20,000	10,000	20,000	50,000
12	Blaas puncti	20,000	10,000	20,000	50,000
13	Reposisi sendi	15,000	10,000	30,000	55,000
14	Bedah minor khusus (yang tidak dikerjakan dalam kamar operasi seperti sirkumstisi, dll)	40,000	60,000	50,000	150,000

2. POLI KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	B:P	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JAS <sup>n</sup> SARANA	JASA PELAYANAN	
1		3		5	6
1	NORPLAN	25,000	50,000	60,000	135,000
2	AKDR/UD	20,000	40,000	35,000	95,000
3	Depo/Injeksi	3,000	10,000	5,000	18,000
4	Pasang Ring	10,000	30,000	50,000	90,000
5	Pemeriksaan selaput dara	15,000	10,000	30,000	55,000
6	Papsmea	15,000	10,000	20,000	45,000
7	Biopsi endometrium	25,000	15,000	30,000	70,000

3. POLI ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Mantoux test	80,000	15,000	10,000	105,000
2	Inhalasi	5,000	20,000	10,000	35,000
3	Imunisasi	2,000	5,000	5,000	12,000
4	Rectal Tube	10,000	5,000	5,000	20,000

4. POLI THIT

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Beloq tampon	15,000	60,000	100,000	175,000
2	Extraksi benda asing liang telinga	5,000	20,000	40,000	75,000
3	Extraksi benda asing hidung	15,000	20,000	25,000	60,000
4	Extraksi benda asing orofaring	20,000	20,000	40,000	80,000
5	Chemocaustic konka	5,000	25,000	20,000	50,000
6	Chemocaustic faring	5,000	25,000	30,000	60,000
7	Aspirasi abses ceptum	20,000	25,000	20,000	65,000
8	Aspirasi perikondritis	20,000	25,000	30,000	75,000
9	insisi abses peritonsil	25,000	35,000	30,000	90,000
10	insisi abses ceptum	25,000	35,000	30,000	90,000
11	insisi abses preaurikula	25,000	70,000	50,000	145,000
12	insisi abses retroaurikula	25,000	70,000	50,000	145,000
13	insisi abses coli	25,000	70,000	50,000	145,000
14	insisi perikonditis/Othaematom	25,000	70,000	50,000	145,000
15	Ekstirpasi kista daun telinga (Pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papiloma, veruca, kelloid, hemangioma)	25,000	70,000	50,000	145,000



16	Transluminesis		5,000	10,000	10,000	25,000
17	Audiogram nada murni		5,000	25,000	30,000	60,000
18	Impedansi audiometri		5,000	25,000	30,000	60,000
19	Nasendoscopy dan nasofaringoscopy		25,000	50,000	50,000	125,000
20	Endoscopy telinga		5,000	40,000	10,000	55,000
21	Laryngoscopy optic		25,000	65,000	60,000	150,000
22	Biopsi tumor hidung		25,000	35,000	35,000	95,000
23	Biopsi nasofaring secara endoscopy		25,000	50,000	40,000	115,000
24	Parasintesis MT		25,000	40,000	40,000	105,000
25	Cuci sinus		100,000	75,000	75,000	250,000
26	Punksi telinga		5,000	15,000	20,000	40,000
27	Infeksi telinga		5,000	15,000	20,000	40,000
28	Spoling serumen		15,000	15,000	20,000	50,000
29	Ekstraksi serumen prop/colesteatoma liang telinga		25,000	25,000	30,000	80,000
30	Pompa hidung		20,000	20,000	15,000	55,000

5. POLI MATA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Refraksi	5,000	10,000	10,000	25,000
2	Glukoma	5,000	10,000	20,000	35,000
3	katarak	5,000	10,000	20,000	35,000
4	Pterigium	25,000	25,000	20,000	70,000
5	Pinguikultitis	5,000	10,000	10,000	25,000
6	Dibetik retinopati	5,000	10,000	10,000	25,000
7	Dibetik hipertensi	5,000	10,000	10,000	25,000

8	Ablasio retina	5,000	10,000	20,000	35,000
9	Kekeruhan Vitrius	5,000	10,000	10,000	25,000
10	Corpus Alineum	25,000	10,000	25,000	60,000
11	Entropion	25,000	10,000	25,000	60,000
12	Ektropion	25,000	10,000	25,000	60,000
13	Trichiasis	5,000	10,000	10,000	25,000
14	papit edema	5,000	10,000	10,000	25,000

1	2	3	4	5	6
15	Papilitis	5,000	10,000	10,000	25,000
16	Neuritis retrobulair	5,000	15,000	25,000	45,000
17	Diplopia	5,000	10,000	10,000	25,000
18	Tumor palpebra	25,000	25,000	35,000	85,000
19	Tumor konjktiva	25,000	25,000	35,000	85,000
20	Conjunctivitis	5,000	10,000	10,000	25,000
21	Blefaritis	5,000	10,000	10,000	25,000
22	Episkeritis	5,000	10,000	10,000	25,000
23	Skentis	5,000	10,000	10,000	25,000
24	Hordiolium	25,000	10,000	40,000	75,000
25	Kalazion	25,000	10,000	40,000	75,000
26	Keratitis	5,000	10,000	10,000	25,000
27	Dakriostitis	5,000	10,000	10,000	25,000
28	Ulcus kornea	25,000	10,000	25,000	60,000
29	Erosi Kornea	25,000	10,000	25,000	60,000
30	laserasi kornea	25,000	10,000	25,000	60,000
31	trauma kimia	25,000	10,000	25,000	60,000

32	Dakriostenonitis		5,000	10,000	10,000	25,000
33	Xantelasma		5,000	10,000	10,000	25,000
34	Fraktur orbita		25,000	10,000	25,000	60,000
35	Herpes zoster		5,000	10,000	10,000	25,000
36	Selulitis orbital		5,000	10,000	10,000	25,000
37	Selulitis preseptal		5,000	10,000	10,000	25,000
38	Visus		5,000	15,000	25,000	45,000
39	Koreksi		5,000	10,000	10,000	25,000
40	Tonometri		15,000	10,000	25,000	50,000
41	Funduscopy		5,000	10,000	10,000	25,000
42	Slit lamp examination		5,000	10,000	10,000	25,000
43	Exterpatie corpus		25,000	10,000	0,000	55,000
44	Test buta warna		5,000	10,000	10,000	25,000
45	Kerator meter		5,000	10,000	10,000	25,000
46	Streak reimos kope		5,000	10,000	10,000	25,000
47	Biometri		5,000	10,000	10,000	25,000
48	Laser yag, ag laser		5,000	25,000	25,000	55,000
49	Goldumen		5,000	10,000	10,000	25,000
50	Nel test		5,000	10,000	10,000	25,000

6. POLI KULIT dan KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT			JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA	
1	2	3	4	5	6	
1	Ganti verband	25,000	10,000	10,000	10,000	45,000
2	Curretage	25,000	10,000	10,000	10,000	45,000
3	Biopsi	25,000	35,000	40,000	100,000	100,000

4	Cauter		25,000	35,000	40,000	100,000
5	Inci		25,000	10,000	30,000	65,000
5	Exclci		25,000	10,000	30,000	65,000
7	Cryc surgery		25,000	10,000	30,000	65,000
8	laser		100,000	150,000	150,000	400,000
9	Aff hechting		5,000	10,000	5,000	20,000
10	Larva migra		5,000	10,000	10,000	25,000

7. POLI PARU

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Spirometri/faal paru	10,000	20,000	20,000	50,000
2	Nebulizer	5,000	15,000	10,000	30,000
3	W S D	350,000	400,000	1,300,000	2,050,000
4	Punksi Cairan Pleura	150,000	30,000	80,000	260,000

8. POLI JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Psikometri				
1	Stabdar Progressive Matrics	-	10,000	10,000	20,000
2	House tree person	-	10,000	10,000	20,000
3	Draw A Man Test	-	10,000	10,000	20,000
4	Test Baum	-	10,000	10,000	20,000
5	Edward Personal Preference Sched	-	15,000	10,000	25,000
6	Theamatic Aperception Test	-	15,000	10,000	25,000

7	MMPI	10,000	15,000	75,000	90,000
8	Wechler Adult Intelligence Scate	-	15,000	10,000	75,000
9	Wechler Intelligence Scate for Children	-	15,000	10,000	25,000
10	Pemeriksaan kesehatan jiwa / narkotik				
	Sederhana :				
	a. Sekolah	-	5,000	10,000	15,000
	b. Pegawai Negeri	-	10,000	10,000	20,000
	Sedang :				
	a. Calon Legislatif	-	25,000	10,000	35,000
	b. Untuk Keperluan cerai	-	25,000	10,000	35,000
	c. Untuk keperluan warisan	-	25,000	10,000	35,000

9 POLI SARAF

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	EEG	50,000	50,000	50,000	150,000
2	EMG	50,000	50,000	50,000	150,000

I. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	TUMPATAN				
	a. Sementara	10,000	10,000	10,000	30,000
	b. Permanen				
	1 Silicate	15,000	15,000	20,000	50,000
	2 Sinar Laser				

	- Kls I	15,000	30,000	60,000
	- Kls III, IV	20,000	40,000	80,000
3	GIC Kls I, V	12,000	20,000	40,000
4	GIC Kls II	14,000	23,000	45,000
II	SCALING			
	a. Score I	10,000	20,000	50,000
	b. Score II	20,000	30,000	75,000
	c. Score III	30,000	40,000	95,000
	d. Score III + Sub Gingiva	35,000	60,000	125,000

1	2	3	4	5	6
III	EXO/ ELEMEN				
	a. Decidui				
	1. Chlor aethyl	10,000	10,000	7,000	27,000
	2. Infiltrasi	15,000	10,000	10,000	35,000
	3. Ulcus	20,000	10,000	15,000	45,000
	b. Permanen				
	1. Radix	10,000	10,000	10,000	30,000
	2. Normal	10,000	10,000	15,000	35,000
	3. Polyp Granulom	10,000	10,000	20,000	40,000
	4. Ancylose	15,000	10,000	25,000	50,000
IV	OPERASI TUMOR				
	a. < 1 cm	30,000	50,000	45,000	125,000
	b. 1-2 cm	75,000	50,000	90,000	215,000
	c. > 2 cm	150,000	50,000	135,000	335,000
V	LAIN-LAIN				
	a. Socket Gusi	10,000	10,000	10,000	30,000
	b. Pulpotomy	10,000	10,000	10,000	30,000

c	P.S.A	15,000	10,000	15,000	40,000
d	Heating I	5,000	10,000	5,000	20,000
e	Incrisabcess	20,000	15,000	25,000	60,000
f	Luxasi TMG	10,000	20,000	30,000	60,000
VI	OPERASI DILUAR KAMAR BEDAH				
a	1. Impacted I	60,000	50,000	75,000	185,000
	2. Abnormal	100,000	50,000	100,000	250,000
	3. EMBEDDED	175,000	50,000	200,000	425,000
	4. Alveolectomy	60,000	50,000	75,000	185,000
	5. Exostosis	60,000	50,000	75,000	185,000
	6. Mucocele	60,000	50,000	75,000	185,000
	7. Overclectomy	60,000	50,000	75,000	185,000
	8. Frenectomy	60,000	50,000	75,000	185,000
	9. Gingivectomy	60,000	50,000	75,000	185,000
b	1. Odontotomy lebih dua elemen	75,000	50,000	100,000	225,000
	2. Enucleate cysta	75,000	50,000	100,000	225,000
	3. Block resectie	75,000	50,000	100,000	225,000
	4. Fracture rahang simple	75,000	50,000	100,000	225,000
	5. Reposisi/ rahang simple	75,000	50,000	100,000	225,000
	6. Extirpatie tumor	75,000	50,000	100,000	225,000
VII	RONTGEN FOTO				
a	Phanoramex	20,000	20,000	25,000	65,000
b	Intra oral ( Dental x-ray )	10,000	20,000	10,000	40,000

J PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JAS. PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Ultrasound	5.000	10.000	10.000	25.000
2	Infra Merah	-	10.000	10.000	20.000
3	Interferential terapi	-	15.000	15.000	30.000
4	Diatemi	-	20.000	15.000	35.000
5	Exercise therapy	-	10.000	10.000	20.000
6	Massage	5.000	10.000	10.000	25.000
7	Chest therapy	5.000	10.000	10.000	25.000
8	Treadmill	-	10.000	10.000	20.000
9	Hot pack	-	10.000	10.000	20.000
10	Cool pack	-	10.000	10.000	20.000
11	Vibrator	-	10.000	10.000	20.000
12	Parafin bath	-	10.000	10.000	20.000
13	Parafin bar	-	10.000	10.000	20.000

K PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	7	3	4	5	6
1	Thorax Foto	20.000	20.000	20.000	60.000
2	Abdomen/ Pelvic	25.000	20.000	20.000	65.000
3	Extremitas atas	25.000	20.000	20.000	65.000



4	Extremitas bawah	25,000	20,000	65,000
5	Schedel/sinus/mesoid/ mandibula	45,000	20,000	85,000
6	Meningebral/ tulang belakang	45,000	20,000	85,000
7	BNO	35,000	20,000	75,000
8	BNO/IVP	220,000	50,000	370,000
9	MDF/ Oesophagus	220,000	50,000	370,000
10	Colon Inloop	220,000	50,000	370,000
11	Appendic	75,000	50,000	200,000

2- INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			4	5	6
I	DARAH RUTIN/HEMATOLOGI				
1.	Haemoglobin	7,000	2,000	2,000	11,000
2.	Leukosit	7,000	2,000	2,000	11,000
3.	Eritrosit	7,000	2,000	2,000	11,000
4.	Trombosit	7,000	2,000	2,000	11,000
5.	LED/BBS	7,000	2,000	2,000	11,000
6.	Diffel	7,000	2,000	2,000	11,000
7.	Haemotokrit	7,000	2,000	2,000	11,000
II	FAECES RUTIN	6,000	3,000	5,000	14,000
III	URINE RUTIN	8,000	2,000	5,000	15,000
IV	GOLONGAN DARAH	7,000	2,000	3,000	12,000
V	TEST KOAGULASI				
1.	Waktu Pendarahan	24,000	2,000	5,000	31,000
2.	Waktu Pembekuan	24,000	2,000	5,000	31,000
VI	FAAL HATI :				
1.	G O T	21,000	3,000	10,000	34,000

2. G.P.T	21,000	3,000	10,000	34,000
3. G.G.T	21,000	3,000	10,000	34,000
4. LDH	21,000	3,000	10,000	34,000
5. Bilirubin Total	21,000	3,000	10,000	34,000
6. Bilirubin Direk	21,000	3,000	10,000	34,000
7. Protein Total	21,000	3,000	5,000	29,000
8. Alkali Pospatase	21,000	3,000	5,000	29,000
VII TEST GULA DARAH				
1. Glucosa Puasa	15,000	3,000	5,000	23,000
2. Glucosa 2 jam PP	15,000	3,000	5,000	23,000
3. Glucosa sewaktu	15,000	3,000	5,000	23,000

1	2	3	4	5	6
VIII LEMAK					
1. Kolesterol total	18,000	3,000	10,000	31,000	
2. Kolesterol LDL	38,000	3,000	10,000	51,000	
3. Kolesterol HDL	38,000	3,000	10,000	51,000	
4. Trigliserida	28,000	3,000	10,000	41,000	
IX JANTUNG					
1. CK	30,000	20,000	15,000	65,000	
2. CK - MB	20,000	20,000	15,000	55,000	
3. LDH	20,000	20,000	15,000	55,000	
X GINJAL					
1. Ureum	18,000	3,000	7,000	28,000	
2. Kreatinin	18,000	3,000	7,000	28,000	
3. Asam Urat	18,000	3,000	7,000	28,000	
4. Urea Clearance	25,000	3,000	7,000	35,000	
5. Kreatinin Clearance	25,000	3,000	7,000	35,000	

	6. Mikrcalbumin Urine		25,000	3,000	7,000	35,000
XI	ELEKTRCLIT					
	1. Kalium		28,000	3,000	5,000	36,000
	2. Natrium		28,000	3,000	5,000	36,000
	3. Chlorida		51,000	3,000	5,000	59,000
	4. Calcium		51,000	3,000	5,000	59,000
	5. Magnesium		51,000	3,000	5,000	59,000
XII	AGDA ( Analisa Gas Darah )		76,000	3,000	5,000	86,000
XIII	PROFIL PANKREAS					
	1. Lipase		75,000	3,000	5,000	83,000
	2. Amilase		75,000	3,000	5,000	83,000
XIV	IMMUNO SEROLOGI SEROMARKER					
	1. Hbs. Ag		55,000	3,000	5,000	63,000
	2. Anti Hbs		55,000	3,000	5,000	63,000
	3. Anti Hbc		145,000	3,000	15,000	163,000
	4. Anti Hbc-IGM		185,000	3,000	20,000	208,000
	5. HbeAg		110,000	3,000	15,000	128,000
	6. Anti HAV		127,000	3,000	15,000	145,000
	7. Anti HCV		115,000	3,000	5,000	133,000
	8. Widal		27,000	4,000	5,000	36,000
	9. Malaria ( Mikroskopik )		11,000	3,000	5,000	19,000
	10. Anti HIV ( ICT )		65,000	3,000	30,000	98,000
	11. Anti Hbe		98,000	3,000	30,000	131,000
XIII	CSP					
	1. Albumin		24,000	3,000	5,000	32,000
	2. Nonne-Pandy		25,000	3,000	5,000	33,000
XIV	NARKOBA					
	1. Methamphetamine		60,000	3,000	10,000	73,000
	2. THC		60,000	3,000	10,000	73,000

3. Morphin			3,000	10,500	73,000
4. Kokain			3,000	10,000	73,000
LAIN-LAIN					
1. Analisa Sperma		20,000	3,000	5,000	38,000
2. Test Kehamilan		18,000	5,000	5,000	28,000
3. KOH 10%		14,000	5,000	5,000	24,000
4. ASTO		35,000	5,000	5,000	45,000
5. IRON		35,000	5,000	5,000	45,000
5. Reumatoid Factor (RF)		45,000	5,000	15,000	65,000
7. CRF		20,000	5,000	15,000	40,000
8. HFV		55,000	5,000	25,000	85,000
9. CA 125		175,000	5,000	25,000	205,000

10. CEA		55,000	5,000	25,000	95,000
11. T3 T4		60,000	5,000	25,000	90,000
12. TSH		60,000	5,000	30,000	95,000
13. Ferritin		90,000	5,000	30,000	115,000
14. TIBC		20,000	5,000	15,000	40,000
15. PT		25,000	5,000	15,000	45,000
16. APTT		40,000	5,000	15,000	60,000
17. TT		40,000	5,000	15,000	60,000
18. Analisa Cairan Pleura		25,000	5,000	15,000	45,000
19. Analisa Cairan Asles		25,000	5,000	15,000	45,000
20. Reticulosid		13,000	5,000	5,000	23,000

L. ASUHAN KEPERAWATAN/ TINDAKAN RUTIN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Pasang Chateter/tindakan	50,000	5,000	15,000	70,000
2	Lepas Chateter (Aff Chateter)	10,000	5,000	5,000	20,000
3	Infus/tindakan	10,000	2,000	5,000	17,000
4	Sonde/tindakan	7,000	2,000	5,000	14,000
5	Injeksi/tindakan	2,000	2,000	2,000	6,000
6	Klisma/tindakan	5,000	2,000	5,000	12,000
7	Voorbreeding/tindakan	5,000	2,000	5,000	12,000
8	Cooling spoling/tindakan	50,000	10,000	30,000	90,000
9	Vulva Hygiene/tindakan	5,000	2,000	5,000	12,000
10	Debridement luka				
	a. Luka kecil/hari	10,000	5,000	10,000	25,000
	b. Luka sedang/hari	15,000	5,000	15,000	35,000
	c. Luka besar/hari	20,000	5,000	20,000	45,000
11	Breast Care	2,000	2,000	2,000	6,000
12	Memandikan Bayi	-	2,000	5,000	7,000
13	Pijat Bayi	-	2,000	5,000	7,000
14	Senam nifas	-	2,000	5,000	7,000
15	Catheter Umpilikal	35,000	10,000	15,000	60,000
16	Pasang Tampon/Aff Tampon	5,000	2,000	5,000	12,000
17	Aff Tampon	2,000	2,000	2,000	6,000

M. TINDAKAN PEMERIKSAAN DENGAN ALAT KHUSUS (ELEKTRO MEDIK CANGGIH KHUSUS)

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	ENDOSCOPY	100,000	200,000	150,000	450,000
2	Colonoscopy	100,000	240,000	150,000	490,000
3	EKG	10,000	20,000	10,000	40,000
4	CTG	10,000	20,000	10,000	40,000
5	USG				
	a. USG Abdomen Upper	10,000	20,000	20,000	50,000
	b. USG Abdomen Lower	10,000	20,000	20,000	50,000
	c. USG Trans Vaginal	25,000	20,000	20,000	65,000
	d. USG Ginekologi Trans Abdominal	10,000	20,000	20,000	50,000
	e. USG Bayi	10,000	20,000	20,000	50,000
	f. USG Bayi + Doppler	10,000	20,000	20,000	50,000
	g. USG Doppler Sederhana	10,000	20,000	20,000	50,000
	h. USG Doppler Vaskuler	10,000	20,000	20,000	50,000
6	Elektro Encephalografi (EEG)	5,000	5,000	35,000	90,000
7	Light Therapi	-	30,000	20,000	50,000
8	Radian Warmer	-	20,000	15,000	35,000
9	Bronchoscopy	100,000	200,000	150,000	450,000
10	Bed Side Monitor	-	30,000	15,000	45,000
11	Tindakan Resusitasi (Ambu, Nebulizer,	25,000	50,000	25,000	100,000
12	Hemodialisa	200,000	250,000	200,000	650,000
13	Infus Pump/Hari	20,000	30,000	15,000	65,000
14	Syringe Pump/Hari	20,000	30,000	15,000	65,000
15	Suction/Hari	10,000	15,000	10,000	25,000

N. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	5
1	Penyediaan kantong Darah	250.000	50.000	25.000	325.000

O. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Oksigen (O <sub>2</sub> ) / liter (sistem central)	80	10	-	90
2	Oksigen (O <sub>2</sub> ) / liter	80	10	-	90

P. PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	RAWAT INAP JENAZAH				
	a. Ruang Biasa / hr	15.000	15.000	10.000	40.000
	b. Ruang Pendingin / hr	15.000	100.000	10.000	125.000
2	PEMERIKSAAN JENAZAH				
	a. Periksa Luar	15.000	15.000	35.000	65.000
	b. Periksa Dalam / Otopsi	200.000	50.000	300.000	550.000
3	PERBAIKAN JENAZAH				
	a. Hecting 1 s/d 10	10.000	20.000	10.000	40.000
	b. Hecting 11 s/d 20	15.000	20.000	15.000	50.000

4	PEMBERSIHAN JENAZAH (MUSLIM)	50,000	50,000	50,000	
5	PENGAWETAN JENAZAH				
	a. Untuk 1 (satu) hari	100,000	20,000	50,000	170,000
	b. Untuk 2 (dua) hari	150,000	20,000	100,000	270,000
	c. Untuk 3 (tiga) hari	200,000	20,000	150,000	370,000
	d. Maksimal 7 hari	250,000	20,000	200,000	470,000
6	PEKAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN JENAZAH)				
	a. Kondisi segar	50,000	50,000	50,000	150,000
	b. Kondisi busuk	75,000	75,000	150,000	300,000
7	SALON JENAZAH ( Rias Jenazah )	200,000	50,000	250,000	500,000

Q. PELAYANAN LAINNYA

1. KONSULTASI PSIKOLOG

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Konsultasi Psikologi	5,000	10,000	10,000	25,000
2	Test Psikologik Baterai Lengkap	5,000	20,000	10,000	35,000
3	Test emosional	5,000	10,000	10,000	25,000
4	Test bakal	5,000	10,000	10,000	25,000
5	Test Kepribadian	5,000	10,000	10,000	25,000

2. KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
2	GIZI LUMUM DAN KHUSUS		5,000	10,000	15,000



3. MOBIL AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
			JASA SARAN	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
1	Dalam Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)				
	a. Dalam Kota (Kec. Pangururan)	45,000	30,000	25,000	100,000
	b. Luar Kota Kecamatan Pangururan	125,000	90,000	35,000	250,000
2	Luar Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)				
	Pangururan-Medan				
	- Siang	435,000	265,000	000,000	1,300,000
	- Malam	435,000	265,000	650,000	1,350,000
	Pangururan-Siantar				
	- Siang	200,000	150,000	300,000	650,000
	- Malam	200,000	150,000	350,000	700,000
	Pangururan-Kabanjahe				
	- Siang	300,000	200,000	350,000	850,000
	- Malam	300,000	200,000	400,000	900,000
	Pangururan-Sidikalang				
	- Siang	200,000	200,000	300,000	700,000
	- Malam	200,000	200,000	350,000	750,000
	Pangururan-Tarutung				
	- Siang	200,000	200,000	400,000	800,000
	- Malam	200,000	200,000	450,000	850,000
	Pangururan-Balige				
	- Siang	200,000	200,000	400,000	800,000
	- Malam	200,000	200,000	450,000	850,000

4. MOBIL JENAZAH (tidak termasuk biaya penveberangan)

NO	JARAK TEMPUH	BHP	JSR	JP	Jumlah
1	0 s/d 10 Km	45.000	30.000	25.000	100.000
2	11 s/d 20 Km	70.000	45.000	35.000	150.000
3	> 21 Km (Biaya tambahan per Km)	2.000	2.000	1.000	5.000

5 ADMINISTRASI KESEHATAN

NO	JENIS TINDAKAN/ADMINISTRASI	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	4	5	6
1	Surat Keterangan Dokter	5.000	5.000	10.000
3	Surat Keterangan Visum et Repertum	5.000	25.000	30.000
4	Surat Keterangan Jasa Raharja :			
	a. Pasien Hidup	5.000	10.000	15.000
	b. Pasien Meninggal	5.000	10.000	15.000

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal, 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

cap/dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C NOMOR 39

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
 NOMOR : 12 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KABUPATEN SAMOSIR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A	Rawat Jalan Tingkat Pertama	2,000	4,000	4,000	10,000
B	Pelayanan Rawat Inap	25,000	25,000	20,000	70,000
1	Pelayanan Perinatologi (Inkubator)	20,000	60,000	40,000	120,000
C.	Pelayanan UGD (Unit Gawat Darurat)				
1.	Heacing				
	a. Luka jahitan (1-3)	15,000	15,000	15,000	45,000
	b. Pertambahan setiap jahitan luka > 3 jahitan	2,000	0	2,000	4,000
	c. Buka heacing	2,000	2,000	2,000	6,000
	d. Pembersihan luka (GV)				
	- kecil	5,000	10,000	5,000	20,000
	- sedang	7,000	10,000	7,000	24,000
	- besar	10,000	10,000	10,000	30,000
2	Kumbah lambung	30,000	25,000	20,000	75,000
3	Spoling Chateter/Cooling spoling	30,000	20,000	20,000	70,000
4	Luka bakar				
	- Ringan	5,000	18,000	10,000	33,000
	- sedang	7,500	18,000	15,000	40,500
	- berat	10,000	18,000	20,000	48,000
5	Syok	5,000	30,000	25,000	60,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS		JUMLAH
		BHP	JASA SARANA/JASA PELAYANAN	
6	Exterpasi benda asing			
	a. Kecil			
	- cerumen proof (1 telinga)			
	- padi, kapas, jagung	5,000	15,000	20,000
	b. Sedang			
	- Kacang, manik-manik, mainan			
	- Ekstraksi kuku	8,000	15,000	25,000
	c. Besar			
	- Mimis (peluru, papan angin)			
	- Exterpasi kuping	10,000	15,000	30,000
	- insisi abses			
7	Vena terapi Abocath	5,000	30,000	40,000
8	Resusitasi Jantung Paru, Orlak	5,000	40,000	30,000
9	Tindakan Sondage	5,000	40,000	50,000
10	Tracheostomi	50,000	40,000	120,000
11	Pemasangan NGT	50,000	15,000	80,000
12	Transfusi Darah	13,000	15,000	38,000
13	Pemasangan spalk untuk fraktur	25,000	15,000	55,000
14	Pemasangan neck kollar	2,000	5,000	12,000
15	Pemberian Nebulizer	3,000	10,000	18,000
16	Debridement kecil	3,000	10,000	18,000
17	Debridement sedang	4,000	15,000	25,000
18	Cross Insisi	6,000	15,000	36,000
19	Blaas punci	10,000	20,000	47,000
20	Reposisi sendi	5,000	10,000	25,000
21	Bedah minor khusus	30,000	40,000	170,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
22	Pemeriksaan selaput dara	5,000	20,000	20,000	45,000
23	Papsmea	5,000	15,000	15,000	35,000
24	Inhalasi Anak	5,000	10,000	9,000	24,000
<b>D THT</b>					
1	Ekstraksi benda asing liang telinga	3,000	15,000	15,000	33,000
2	Ekstraksi benda asing hidung	3,000	13,000	12,000	28,000
3	Ekstraksi benda asing orofaring	4,000	20,000	20,000	44,000
4	Insisi abses preaurikula	10,000	55,000	50,000	115,000
5	Insisi abses retroaurikula	10,000	55,000	50,000	115,000
6	Infeksi telinga	10,000	15,000	15,000	40,000
7	Spoling serumen	15,000	10,000	10,000	35,000
8	Ekstraksi serumen prop/ colesteatoma liang telinga	2,000	10,000	10,000	22,000
<b>E Mata</b>					
1.	Refraksi	3,000	11,000	5,000	19,000
2.	Glaukoma	3,000	17,000	4,000	24,000
3.	Katarak	3,000	17,000	4,000	24,000
4.	Pterigium	3,000	17,000	4,000	24,000
5.	Pinguiktitis	3,000	17,000	4,000	24,000
6.	Corpus Alneum	4,000	17,000	4,000	24,000
7.	Conjungtivitis	3,000	17,000	6,000	27,000
<b>F Pelayanan Gigi dan Mulut</b>					
1.	Tumpatan/Tambal gigi				
	a. Sementara	5,000	5,000	5,000	15,000
	b. Permanen (Silicate)	8,000	10,000	10,000	28,000
2.	GIC Kts (V Tambalan putih)	10,000	10,000	10,000	30,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUKESMAS		JUMLAH
		RHF	JASA SARANA & JASA PELAYANAN	
3	Scaling			
	a. Score III + Sub Gingiva	20,000	20,000	60,000
4	EXO/ELEMEN			
	a. Decidui			
	1. Chlor aethyl	4,000	5,000	13,000
	2. Infiltrasi	7,000	10,000	27,000
	3. Ulcus	8,000	10,000	28,000
	b. Permanen			
	1. Radix	6,000	10,000	26,000
	2. Normal	8,000	10,000	28,000
	3. Polyp Granulom	10,000	15,000	40,000
5	Lain-lain			
	- Socket gusi	6,000	10,000	24,000
	- Hecting I	5,000	6,000	17,000
	- Incisiabses/cm	18,000	20,000	58,000
	- Luxasi TMG	10,000	25,000	55,000
6	Operasi			
	- Impacted I	50,000	50,000	145,000
	- Odontectomy lebih dua elemen	70,000	100,000	270,000
	- Reposisi/ rahang simple	70,000	120,000	290,000
7	Rehabilitasi Gigi/Protesa Gigi			
	a. Full Proteza rahang atas/bawah			
	- Plastik	120,000	20,000	215,000
	- keramik	180,000	20,000	300,000
	b. Parsial Proteza			
	- Plastik	50,000	20,000	120,000
	- Keramik	80,000	20,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS		JUMLAH
		BHP	JASA SARANA JASA PELAYANAN	
	c Pkks Protesa			
	- Plastik	20,000	20,000	60,000
	- Keramik	30,000	20,000	80,000
	d Jaket Protesa			
	- Plastik	8,000	5,000	18,000
	- Keramik	9,000	5,000	19,000
G	Laboratorium			
1	Darah Rutin			
	- Haemoglobin	2,000	3,000	7,000
	- Leukosit	2,000	3,000	7,000
	- Eritrosit	2,000	3,000	7,000
	- Trombosit	2,000	3,000	7,000
	- Gula darah (random)	5,000	3,000	10,000
	- Golongan darah	2,000	3,000	7,000
2	Faeces rutin	4,000	3,000	10,000
3	Urin Rutin	4,000	3,000	12,000
4	Test kehamilan	5,000	3,000	11,000
5	Oksigen (O2)/Ltr	80	3,10	90
H	Pemeriksaan jenazah (Periksa luar)	15,000	15,000	55,000
1	Perbaikan jenazah			
	- Hecting 1 s/d 10	10,000	15,000	35,000
	- hecting 11 s/d 20	15,000	15,000	45,000
	- hecting > 21	20,000	15,000	55,000
2	Pembersihan jenazah	40,000	40,000	120,000
3	Pengawetan Jenazah			
	- untuk satu hari	80,000	15,000	145,000
	- untuk dua hari	110,000	15,000	225,000



NO	JENIS PELAYANAN	JASA PUSKESMAS			JUMLAH
		BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	- untuk tiga hari atau lebih maksimal 7 hari	150,000	15,000	150,000	315,000
1	<b>PUSKESMAS KELILING</b>				
1	Dalam Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)				
	a. Dalam Kecamatan	45,000	30,000	25,000	100,000
	b. Luar Kecamatan	125,000	90,000	35,000	250,000
2	Luar Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)				
	Pangurusan-Medan				
	- Siang	435,000	265,000	500,000	1,300,000
	- Malam	435,000	265,000	650,000	1,350,000
	Pangurusan-Sientar				
	- Siang	200,000	150,000	300,000	650,000
	- Malam	200,000	150,000	350,000	700,000
	Pangurusan-Kabanjaha				
	- Siang	300,000	200,000	350,000	850,000
	- Malam	300,000	200,000	400,000	900,000
	Pangurusan-Sidikulang				
	- Siang	200,000	200,000	300,000	700,000
	- Malam	200,000	200,000	350,000	750,000
	Pangurusan-Tarutung				
	- Siang	200,000	200,000	400,000	800,000
	- Malam	200,000	200,000	450,000	850,000
	Pangurusan-Balige				
	- Siang	200,000	200,000	400,000	800,000
	- Malam	200,000	200,000	450,000	850,000



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal, 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

cap/dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 41 SERIC NOMOR 39